



MANAJEMEN PEMBIAYAAN UNTUK MENINGKATKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Oviria¹, Zamirna², Wahyuningsih³

¹⁻³Institut Agama Islam An Nur Lampung

Email: oviria16@gmail.com

Abstract: *This journal describes financial management in improving education management in schools and madrasahs. The results found include: first, the feasibility of infrastructure, facilities, human resources, as well as facilities and infrastructure because the availability of qualified financing at SMPN 10 Bandar Lampung is directly proportional to the quality of education. Regular students achieve academic and non-academic achievements. Many of the graduates of SMP Negeri10 Bandar Lampung are also scattered in high schools which are in the favorite category; Secondly, high motivation from various elements in MTs Mathla'ul Anwar Labuhan Ratu Bandar Lampung especially school principals and educators also has a major effect on the quality of education. Given, a number of madrasah graduates are also able to compete to enter secondary schools which are classified as favorites.*

Keywords: *financing management, education*

Abstrak: Jurnal ini menjelaskan tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan pengelolaan pendidikan di sekolah dan madrasah. Hasil yang ditemukan antara lain: *pertama*, kelayakan infastruktur, fasilitas, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana karena ketersediaan pembiayaan yang mumpuni di SMPN 10 Bandar Lampung berbanding lurus dengan mutu pendidikannya. Siswa langganan meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Lulusan SMPN 10 Bandar Lampung juga banyak tersebar di sekolah lanjutan yang masuk kategori favorit; *keduan*, motivasi tinggi dari berbagai unsur di MTs Mathla'ul Anwar Labuhan Ratu Bandar Lampung , terutama kepala sekolah dan tenaga pendidik juga berpengaruh besar pada mutu pendidikan. Mengingat, sejumlah lulusan madrasah tersebut juga mampu bersaing untuk masuk ke sekolah lanjutan yang tergolong favorit.

Kata Kunci: *manajemen pembiayaan, pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perihal berbangsa dan bernegara, pendidikan menjadi perhatian utama karena mendukung kemajuandari berbagai aspek. Mengingat, pendidikan mengemban misi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berpengaruh pada peradaban bangsa.(Latifah et al., 2021)

Penyelenggara pendidikan bukan sebatas pemerintah daerah, tetapi juga berbasis masyarakat. Sumber pembiayaan untuk pemenuhan fasilitas pendidikan beragam, baik dari anggaran negara maupun masyarakat.



Dukungan anggaran penting dalam penyelenggara pendidikan. Ketersediaan dana berpengaruh pada kualitas pelayanan pendidikan. Negara pun telah mendorong peningkatan kualitas bagi setiap penyelenggara pendidikan melalui sejumlah bantuan. Tujuannya agar penyelenggaraan pendidikan dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan pendidikan, standar pengelolaan, serta standar penilaian pendidikan. (Imron, 2016)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan, SNP bersifat dinamis, diselaraskan dengan perkembangan masyarakat lokal, nasional, dan global. Penetapan SNP sebagai bentuk komitmen nasional atas upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa. Namun, tidak selamanya pembiayaan yang memadai berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Terdapat komponen lain yang dapat dapat mengangkat kualitas pendidikan, seperti motivasi tinggi dari pendidik dan tenaga kependidikan. Fataknnya, di sejumlah sekolah/madrasah, sarana dan prasarana yang terbatas tidak mengendurkan semangat penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi SNP dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Pendidikan menjadi urusan penting bagi negara untuk tujuan menciptakan sumber daya manusia bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Mengingat, tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pada kemajuan dan peradaban bangsa (Warisno, 2019). Jaminan pendidikan bagi warga Indonesia, berikut kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraannya telah diatur dalam regulasi. Secara tegas Undang- Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyebutkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Selain pemerintah, sumber pembiayaan pada suatu sekolah juga didukung dari sumber lain, seperti orang tua/peserta didik dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. (Fauziah, 2014)

Adapun biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi satuan pendidikan terdiri atas: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang



melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya (Sulistiyoningrum, 2010).

Berdasar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dari level pusat hingga daerah memiliki kewajiban menjamin ketersediaan dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Mengingat, warga negara yang masuk dalam kategori sasaran program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Tanggung jawab negara atas program wajib belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kewajiban itu membawa konsekuensi pengalokasian anggaran pendidikan paling sedikit 20 persen dari APBN, di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Pengalokasian anggaran tersebut berorientasi pada jaminan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Dana pendidikan yang bersumber dari APBN sebesar 20 persen menyentuh banyak aspek. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi bagian dari komponen alokasi yang masuk dalam alokasi dana transfer khusus kategori Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik. Pada 2019, besaran alokasi dana BOS tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Berdasar Permendikbud Nomor 3 tahun 2019 tentang Juknis BOSSD, SMP, SMA, SMK tahun 2019, satuan biaya BOS regular sebagai berikut:

1. SD sebesar Rp 800.000 per satupeserta didik setiap satu tahun.
2. SMP sebesar Rp 1.000.000 per satupeserta didik setiap satu tahun.
3. SMA sebesar Rp 1.400.000 per satupeserta didik setiap satu tahun.
4. SMK sebesar Rp 1.600.000 per satupeserta didik setiap satu tahun.
5. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp 2.000.000 per satu peserta didik setiap satu tahun.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang implementasi pembiayaan pendidikan di di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mathla'ul Anwar Labuhan Ratu Bandar Lampung dan SMPN 10 Bandar Lampung ditempuh pendekatan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif sering disebut juga penelitian naturalistik karena



penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2014:8). Kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Sugiyono, 2014:8). Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun teknik dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.

PEMBAHASAN

Peran motivasi dalam pengelolaan satuan pendidikan relatif penting. Mengingat, motivasi menjadi bagian dari unsur manajemen pendidikan. Dalam bukunya Ismail Solihin (Ismail Solihin, 2009), Kanfer mengatakan, motivasi merupakan kekuatan psikologis yang akan menentukan arah dari perilaku seseorang, tingkat upaya dari seseorang, dan tingkat ketegaran pada saat orang itu dihadapkan pada berbagai rintangan. Adapun fungsi motivasi bagi manusia, menurut Hadari Nawawi dalam bukunya Badrudin (Badrudin: 2013), yaitu sebagai energi atau penggerak bagi manusia, pengatur memilih alternatif di antara dua atau lebih kegiatan yang bertentangan, dan pengatur arah atau tujuan dalam melakukan aktivitas.

Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang manajer, tujuan motivasi ialah untuk menggerakkan pegawai atau bawahan dalam usaha meningkatkan prestasinya sehingga tercapai tujuan organisasi yang dipimpinya. Bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan dalam kurikulum sekolah (Purwanto, 2002).

Penerapan motivasi dalam menggerakkan sumber daya lain dalam pengelolaan sekolah juga dibutuhkan agar memenuhi tujuan pendidikan. Upaya mengoptimalkan potensi yang ada, terutama pembiayaan menjadi keniscayaan guna mendukung penyelenggaraan pendidikan ideal. Selain pemerintah, sejumlah elemen yang menjadi potensi dalam mendukung pembiayaan pendidikan adalah orang tua siswa dan masyarakat.

Penyediaan dana dari pemerintah untuk mendukung kebijakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar negeri maupun swasta memiliki dampak beragam, terutama dalam implementasi pengelolaan sekolah melalui manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS, yang merupakan konsep pengelolaan sekolah dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan, memberi otonomi luas pada sekolah untuk mengelola sumber daya dan sumber dana sesuai prioritas kebutuhan. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



menyebutkan, pengelolaan satuan pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasissekolah/madrasah.

MBS bertujuan memberdayakansekolah, terutama sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat) melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi sekolah. Dengan MBS, sekolahmendapat otonomi luas dan tanggung jawab dalam menggali, memanfaatkan, serta mengarahkan berbagai sumber daya, baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah Karena itu, sebagai sebuah organisasi, sekolah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.(Shinta Rizki et al., 2021)

(MTs) Mathla'ul Anwar Labuhan Ratu Bandar Lampung merupakan madrasah formal yang berstatus swasta. (MTs) Mathla'ul Anwar Labuhan Ratu Bandar Lampung tidak dikenal luas masyarakat Pati. Kendati berada tidak menjadi kendala madrasah untuk mendapatkan peserta didik. Setiap tahun ajaran baru, siswa yang masuk ke MTs hampir memenuhi batas maksimal rombongan belajar (Rombel). Upaya pengelola (MTs) Mathla'ul Anwar Labuhan Ratu Bandar Lampung dalam memenuhi fasilitas pendidikan agak layak tidak pernah putus. Fasilitas yang hampir tidak dimiliki madrasah swasta seperti laboratorium komputer dan jaringan internet telah tersedia lama di MTs (MTs) Mathla'ul Anwar Labuhan Ratu Bandar Lampung.

Madrasah ini kini memiliki 91 siswa yang terbagi dalam tiga rombel untuk jenjang kelas VII, VIII, dan IX. Terdapat 11 tenaga pendidik yang melayani siswa, termasuk kepala madrasah. Dari jumlah guru tersebut, kebanyakan telah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai bidang pengajarannya. Namun, baru dua guru yang telah mengantongi sertifikasi pendidik, salah satunya kepala madrasah, yang juga masih aktif mengajar.

Berkat berbagai upaya, kondisi (MTs) Mathla'ul Anwar Labuhan Ratu Bandar Lampung yang relatif terbatas tidak terlalu menjadi persoalan yang menjadikan situasi tidak kondusif. Bahkan, tenaga pendidik termotivasi untuk turut mengangkat madrasah sebagai ladang jihad. Kedisiplinan dan keseriusan mereka dalam mengahar siswa tidak goyah karena kepala madrasah merupakan figur yang dapat memberi manfaat masyarakat.

SMP Negeri 10 Bandar Lampung

SMP Negeri 10 Bandar Lampung sejauh ini dikenal sekolah favorit di Bandar Lampung. Untuk mendukung proses belajar mengajar, SMP Negeri 10 Bandar Lampung menyediakan 29 ruang kelas, empat laboratorium, dan satu gedung perpustakaan, serta akses internet tak terbatas. Saat ini, sekolah yang telah berdiri 60 tahun itu, memiliki 53 guru. Dari jumlah guru tersebut,



sebanyak 71,7 persen telah berstatus PNS dan 58,49 persen merupakan guru sertifikasi. Data tersebut menunjukkan, dari sisi tenaga pendidik telah mumpuni untuk bekerja maksimal. Mayoritas guru yang telah menyandang status PNS menunjukkan tingkat kesejahteraan layak sehingga memotivasi kinerja mereka. Apalagi, lebih dari separo guru telah tersertifikasi sebagai pendidiksesuai kompetensinya, tentu lebihmenjadikan mereka profesional.

Tidak sebatas itu, pembiayaan yang dikelola SMP Negeri 10 Bandar Lampung di atas rata-rata. Setiap tahun, pihaknya menerima alokasi BOS yang bersumber dari APBN mencapai Rp 928.000.000,-. Jumlah itu, masih ditambah dengan kucuran bantuan pendidikan dari APBD senilai Rp 79.808.000,-, dengan perincian setiap siswa per tahun dijatah Rp 86.000,-. Bagi SMP Negeri 10 Bandar Lampung, ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta pembiayaan memadai dan sumber daya manusia mumpuni membuat pihaknya tidak kesulitan memacu kinerja semua unsur, yang pada gilirannya kualitas pendidikan tercapai. Lulusan SMP Negeri 10 Bandar Lampung sejauh ini tidak kesulitan mencarisekolah ke jenjang yang lebih tinggi..

Tidak hanya bidang akademik, kelayakan fasilitas serta sarana dan prasarana juga memacu prestasi non- akademik, baik di bidang olahraga (karate) maupun kesenian tradisional (tari, karawitan) dan kontemporer (band dan orkestra).

KESIMPULAN

Berdasar penelitian tersebut, dapat disimpulkan dua hal: Kelayakan infastruktur, fasilitas, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana karena ketersediaanpembiayaan yang mumpuni di SMP Negeri 10 Bandar Lampung berbanding lurus dengan mutu pendidikannya. Siswa langganan meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Lulusan SMP Negeri 10 Bandar Lampung juga banyak tersebar di sekolah lanjutan yang masuk kategori favorit. Namun, di sisi lain, motivasi tinggi dari berbagai unsur di MTs (MTs) Mathla'ul Anwar Labuhan Ratu Bandar Lampung terutama kepala sekolah dan tenaga pendidik juga berpengaruh besar pada mutu pendidikan. Mengingat, sejumlah lulusan madrasah tersebut juga mampu bersaing untuk masuk ke sekolah lanjutan yang tergolong favorit.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah. (2014). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kemandirian Pesantren Salaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan)*.
- Imron, M. J. (2016). Manajemen pembiayaan sekolah. *Al -'Ibrah*, 1(1), 69-93.



Latifah, A., Warisno, A., & Hidayah, N. (2021). Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di Ma Nurul Islam Jati Agung. *Jurnal Mubtadiin*, 7(2), 107-108.

Purwanto, Ngalm. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: RemajaRosdakarya. 2002.

Shinta Rizki, Muhammad Ainul, Ardisca Evanandy, Galuh, J., & Abd Charis. (2021). Implementasi Six Sigma Pada Organisasi Sekolah Menggunakan Pendekatan Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC). *Journal of Computer Science and Applied Informatics*, 3(1), 139-150.

Warisno, A. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Lulusan Pada Lembaga Pendidikan Islam Di Kabupaten. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 3(02), 99. <https://doi.org/10.32332/riayah.v3i02.1322>